BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya pada biro akuntansi dan pelaporan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) Bandung.

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1.1 Sejarah Singkat Pemprov Jabar

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya air, alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, pesisir dan laut serta sumber daya perekonomiannya yang sangat maju di berbagai bidang.

Perkembangan sejarah menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama di bentuk di wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Provinsi Jawa Barat telah di pimpin oleh 12 orang Gubernur sampai saat ini,yaitu :

1. M. Sutardjo Kartohadi (1945 – 1946)
2. Mr. Datuk Djamin (1946)
3. M. Sewaka (1946 - 1952)
4. R. Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952 - 1956)
5. R. Ipik Gandama (1956 - 1960)
6. H. Mashidu (1960 - 1970)
7. Solihin GP (1970 - 1975)
8. H. Aang Kunaefi (1975 - 1985)
9. HR. Yogie SM (1985 - 1993)
10. R. Nuriana (1933 - 2003)
11. H. Danny Setiawan (2003 - 2008)
12. H. Ahmad Heryawan (2008 – Sekarang)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari ; Sekretariat Daerah (SETDA), 20 Dinas, 15 Badan, 1 Kas Daerah, dan 1 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu yang mempunyai Visi dan Misi.Visi dan Misi tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jabar, berikut ini Visi dan Misi Pemprov Jabar :

- **VISI Pemprov Jabar :**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup

dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

"Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera"

Di dalam Visi tersebut banyak makna yang terucap dan menjadi acuan semua masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Visi tersebut sebagai alat dan penyemangat dalam kehidupan sehari-hari, untuk lebih jelasnya adapula penjabaran dari arti Visi Jawa Barat tersebut,yaitu :

1. Mandiri

   Terus berusaha adalah sikap dan kondisi semua masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pelayanan publik yang berbasis *e-government* , energy, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

2. Dinamis

   Selalu ingin maju dalam hal apapun adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon sekecil apapun peluang yang ada dan tantangan zaman yang semakin tahun semakin bersaing antara satu dengan yang lainnya juga ikut serta berkontribusi dalam proses pembangunan daerah untuk kepentingan dan kenyamanan bersama sesama warga Jawa Barat.

3. Sejahtera

Saling menghormati adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir maupun batin mendapatkan rasa aman dan nyaman serta makmur dalam menjalani kehidupan juga saling membantu antara satu sama lain.

- **MISI Pemprov Jabar :**

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, yaitu:

1. **Misi Pertama**, "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing".

   Tujuan :Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja; Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

   Sasaran :Tuntasnya program pemberantasan buta aksara; Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak; Meningkatnya pelayanan sosial dan penangguangan korban bencana; Meningkatnya kesetaraan gender; Meningkatnya kualitas dan perindungan terhadap tenaga kerja; Meningkatnya

peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat; Meningkatnya kualitas kehidupan beragama; Revitalisasi niai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. **Misi Kedua**, "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal".

   Tujuan :Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

   Sasaran :Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal; Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja; Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing; Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. **Misi Ketiga**, "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah".

   Tujuan :Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

   Sasaran :Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa; Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat; Meningkatnya akses

masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) ;Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. **Misi Keempat**, "Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan".

   Tujuan :Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

   Sasaran :Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk; Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana; Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan; Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. **Misi Kelima**, "Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi".

   Tujuan :Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel; Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

   Sasaran :Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi; Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerahserta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; Meningkatnya

kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan; Meningkatnya peran dan fungsi partai politik; Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik; Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan susunan wewenang kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja tetap serta mengatur hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peranan masing-masing jabatan dalam mewujudkan kerjasama, struktur organisasi juga membuka adanya kesatuan arah dan langkah dalam melaksanakan kegiatan, serta adanya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Struktur organisasi di Biro Keuangan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala biro, dimana Biro Keuangan ini membawahi :
   a) Bagian Anggaran, membawahkan:

1) Subbagian Anggaran Program;
2) Subbagian Anggaran Non Program;
3) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;

b) Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
1) Subbagian Perbendaharaan Belanja Program;
2) Subbagian Perbendaharaan Belanja Non Program;
3) Subbagian Belanja Pegawai;

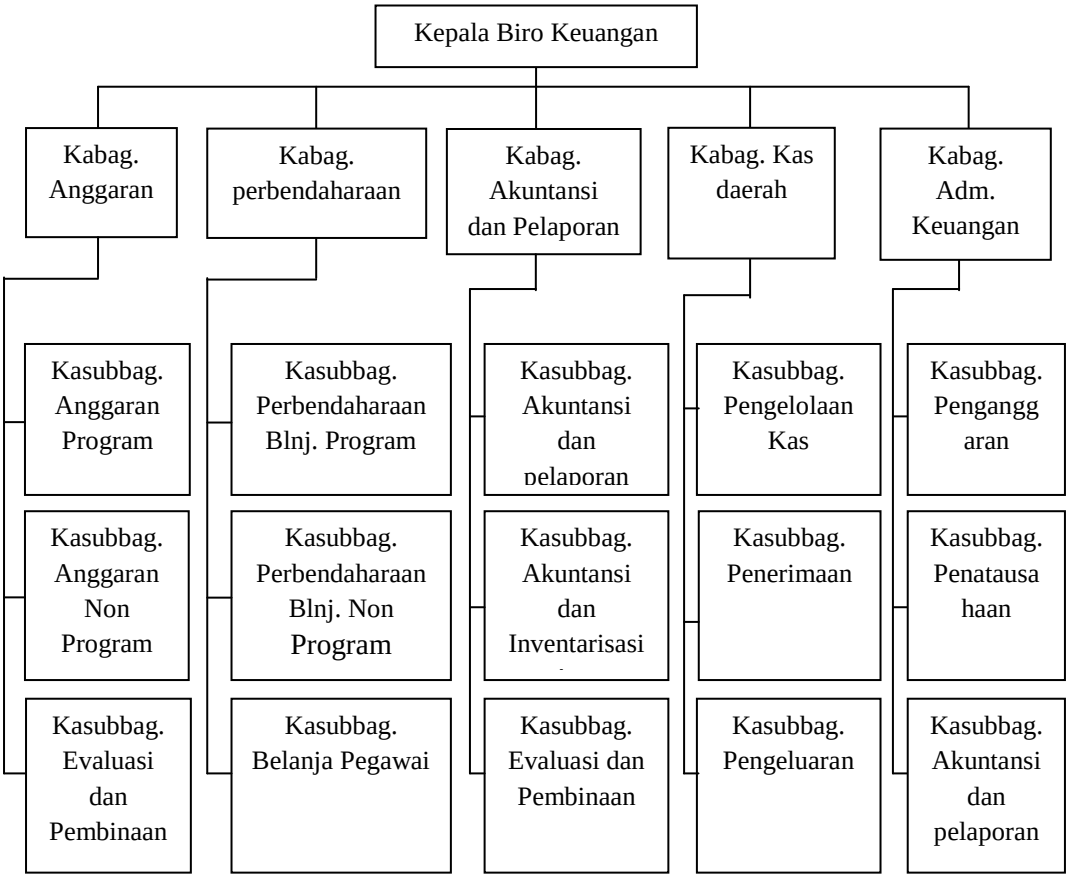
c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
2) Subbagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset;
3) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan;

d) Bagian Kas Daerah, membawahkan:
1) Subbagian Pengelolaan Kas;
2) Subbagian Penerimaan;
3) Subbagian Pengeluaran;

e) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan:
1) Subbagian Penganggaran;
2) Subbagian Penatausahaan;
3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;

Struktur Organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat



Sumber : Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Gambar 4.1

Stuktur Organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

4.1.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 tahun 2009 pada pasal 131 menyebutkan:

1. Biro Keuangan mempunyai fungsi pokok yaitu :
   a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
   b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
   c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
2. Rincian tugas Biro Keuangan adalah sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Keuangan
   b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
   c. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran
   d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan
   e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan
   f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Kas Daerah

g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah
h. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah
i. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD
j. Menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
l. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
m. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro Keuangan
n. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Keuangan
o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan
p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4.1.1.4 Aktivitas Pemprov Jabar

Bagian Akuntansi dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan yang sangat penting kontribusinya untuk menyusun dan meninjau semua transaksi yang ada/terjadi.

Berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan di Pemprov Jabar oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebujakan umum akuntansi keuangan Daerah.
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum peleporan keuangan Daerah.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan.
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
8. Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan.
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan.
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan juga membawahkan :

1. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan.

   Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan berbagai aktivitas yang di antaranya:

   a. Menyusun program kerja Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
   b. Menyusun bahan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
   c. Melaksanakan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan.
   d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian akuntansi dan pelaporan.

Kebijakan akuntansi harus dibuat untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan umum dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan akuntansi diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat, termasuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran secara tersanding di tingkat SKPD/OPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Dalam hal ini juga staf yang bertugas menyusun Catatan atas Laporan Keuangan melakukan konsolidasi dengan tiap SKPD tingkat provinsi untuk dijadikan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan pemda. Selain melakukan konsolidasi, sub bagian ini pun melakukan koordinasi dengan tiap SKPD tersebut untuk mengurangi kesalahpamahan dalam menyusun CaLK pemda sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel,yaitu:

1. Menyusun bahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
3. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan koordinasi dengan tiap SKPD tingkat Provinsi Jawa Barat agar pada saat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan tidak ada kesalahpahaman antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan oleh staf Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan staf tiap SKPD yang bertugas membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Koordinasi biasanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

4.1.2 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD Sebelum Konversi

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD (LRA SKPD/OPD) disusun untuk semester pertama dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD/OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SKPD/OPD....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	**PENDAPATAN**			
1 1	**Pendapatan Asli Daerah**			
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	JUMLAH			
2	**BELANJA**			
2 1	**Belanja Tidak Langsung**			
2 1 1	Belanja Pegawai			
2 2	**Belanja Langsung**			
2 2 1	Belanja Pegawai			
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 2 3	Belanja Modal			
	JUMLAH			
	Surplus/Defisit			

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.2

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD

Konversi Untuk Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD

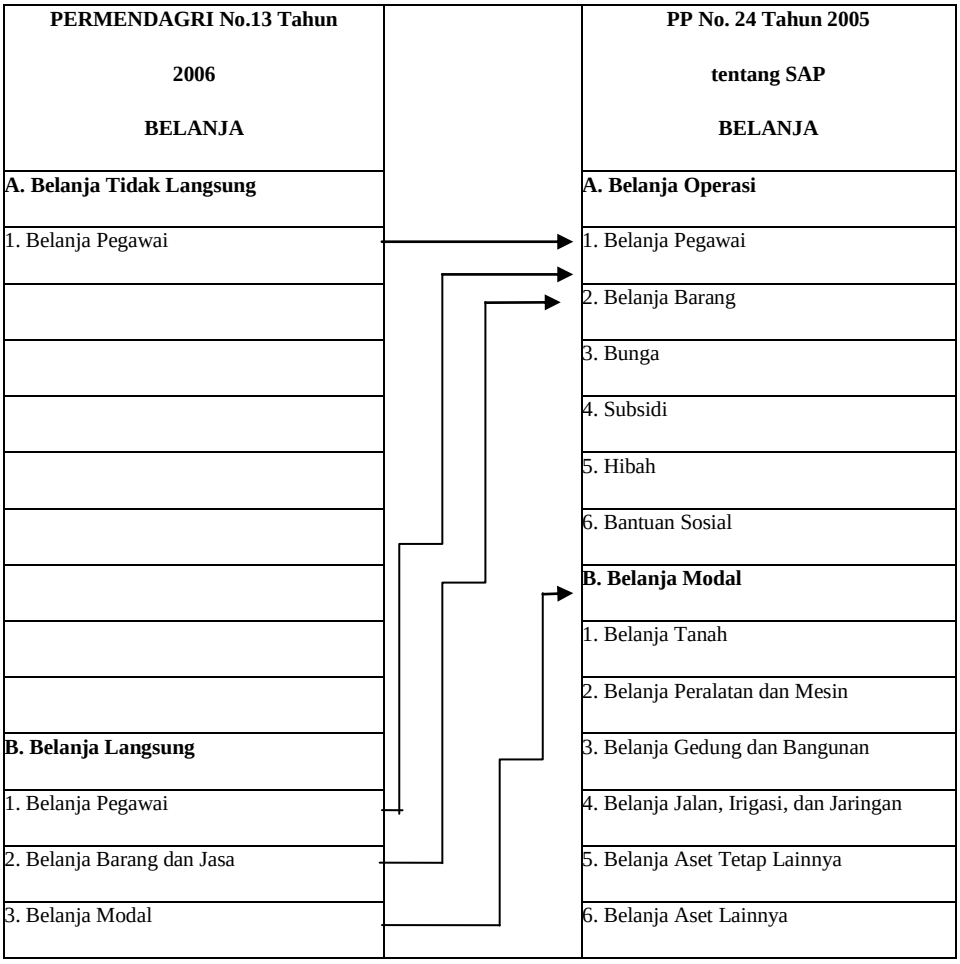
PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 PENDAPATAN		**PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN**
Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah		4. Lain-lain PAD yang Sah

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.3

Konversi Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD

1. Pendapatan Asli daerah merupakan wewenang SKPD/OPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.



Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.4

Konversi Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD

2. Belanja yang merupakan wewenang SKPD/OPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan diatas, harus dilakukan konversi, yaitu :

   Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SPA, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk belanja langsung konversi sebagai berikut :

a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

3. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klarifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penajabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Melapokan Realisasi Anggaran SKPD/OPD Setelah Konversi

Setelah melakukan konversi, maka format laporan realisasi anggaran SKPD/OPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

SKPD/OPD……

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	**Pendapatan**				
1 1	**Pendapatan Asli Daerah**				
1 1 1	Pajak Daerah				
1 1 2	Retribusi Daerah				
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan				
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	**Belanja**				
2 1	**Belanja Opersai**				
2 1 1	Belanja Pegawai				
2 1 2	Belanja Bunga				
2 2	**Belanja Modal**				
2 2 1	Belanja Tanah				
2 2 2	Belanja Peralatan Mesin				
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2 2 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan				
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2 2 6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/Defisit				

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.5

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/OPD Setelah Konversi

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER……..

(Dalam Rupiah)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	**Pendapatan**			
1 1	**Pendapatan Asli Daerah**			
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1 2	**Dana Perimbangan**			
1 2 1	Dana Bagi Hasil			
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil pajak			
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan pajak/SDA			
1 2 2	2. Dana Alokasi Umum			
1 2 3	3. Dana Alokasi Khusus			
1 3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**			
1 3 1	Pendapatan Hibah			
1 3 2	Dana Darurat			
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan			
	Pemerintah Daerah Lainnya			
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau			
	Pemerintah Daerah Lainnya			

	Jumlah Pendapatan			
2	**Belanja**			
2 1	**Belanja Tidak Langsung**			
2 1 1	Belanja Pegawai			
2 1 2	Belanja Bunga			
2 1 3	Belanja Subsidi			
2 1 4	Belanja Hibah			
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial			
2 1 6	Belanja Bagi Hasil			
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan			
2 1 8	Belanja Tidak Terduga			
2 2	**Belanja Langsung**			
2 2 1	Belanja Pegawai			
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 2 3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	Surplus/Defisit			
3	**Pembiayaan Daerah**			
3 1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**			
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3 2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3 3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**			

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.6

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Sebelum Konversi

Konversi Untuk Laporan Realisasi Anggaran PPKD

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
PENDAPATAN	**PENDAPATAN**
A. Pendapatan Asli Daerah	**A. Pendapatan Asli Daerah**
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
B. Dana Perimbangan	**B. Pendapatan Transfer**
1. Dana Bagi Hasil :	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan**
- Dana Bagi Hasil pajak	Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan pajak/SDA	Dana Bagi Hasil Pajak (Sumber Daya Alam)
2. Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**
1. Pendapatan Hibah	Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**
	Pendapatan Hibah
	Pendapatan Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

Sumber : Data Diolah, 2011

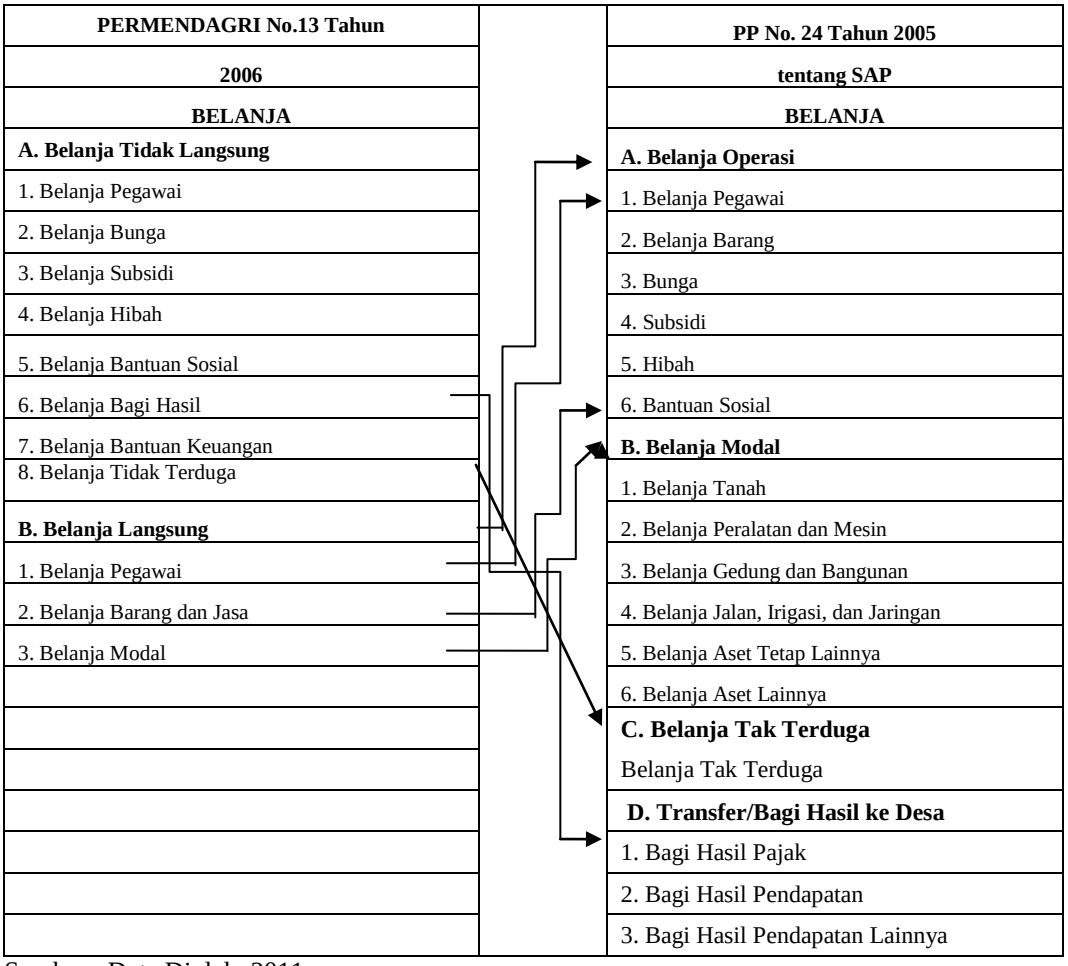
Gambar 4.7

Konversi Untuk Laporan Realisasi Anggaran PPKD

1. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

a. Dari komponen dana perimbangan, yakni : Dana bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.

b. Dari komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.



Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.8

Konversi Untuk Laporan Realisasi Anggaran PPKD

2. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

   Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :

   a. Komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
   b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang,
   c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

3. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun belanja bagi hasil. Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut :

   a. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
   b. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

4. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klarifikasi anggaran belanja langsung dalam

APBD, tetapi untuk tujuan Penajabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 **PENDAPATAN**		**PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP** **PENDAPATAN**
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah		**A. Penerimaan Pembiayaan Daerah**
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
2. Pencairan Dana Cadangan		2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	→	4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		**B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**
1. Pembentukan Dana Cadangan		1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang		3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah		4. Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.9

Konversi Untuk Laporan Realisasi Anggaran PPKD

5. Penerimaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA dalam Neraca, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman dalam negeri.
6. Pengeluaran pembiaayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Setelah Konversi

Setelah melakukan konversi, maka format laporan realisasi anggaran SKPD/OPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

SKPD/OPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	**PENDAPATAN**				
1 1	Pendapatan Pajak Daerah				
1 2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1 3	Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1 2	**Pendapatan Transfer**				
1 2 1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan**				
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Pajak (Sumber Daya Alam)				
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum				
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus				
1 2 2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**				
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus				
1 2 2 2	Dana Penyesuaian				
1 3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1 4	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**				
1 4 1	Pendapatan Hibah				
1 4 2	Pendapatan Dana Darurat				
1 4 3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	**BELANJA**				
2 1	**Belanja Operasi**				

2 1 1	Belanja Pegawai				
2 1 2	Belanja Barang				
2 1 3	Belanja Bunga				
2 1 4	Belanja Subsidi				
2 1 5	Belanja Hibah				
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial				
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan				
2 2	**Belanja Modal**				
2 2 1	Belanja Tanah				
2 2 2	Belanja Peralatan Mesin				
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2 2 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan				
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2 2 6	Belanja Aset Lainnya				
2 3	**Belanja Tidak Terduga**				
2 3 1	Belanja Tidak Terduga				
2 4	**Transfer/Bagi Hasil ke Desa**				
2 4 1	Bagi Hasil Retribusi				
2 4 2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	**PEMBIAYAAN**				
3 1	**Penerimaan Daerah**				
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah				
3 2	**Pengeluaran Daerah**				
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang				
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Pembiayaan Netto				
3 3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**				

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.10

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Setelah Konversi

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan PEMDA

1. Laporan Keuangan gabungan Pemda disusun setiap semester, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.
2. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut ini contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan :

NO	URAIAN	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Pajak Daerah	**xxx**	**xxx**		**xxx**
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah			xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana Perimbangan/transfer			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan Yang Sah			xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**xxx**	**xxx**	xxx	xxx
11	Belanja			xxx	xxx
12	Belanja Tidak Langsung/Opersai	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Langsung/Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiyaan daerah			xxx	xxx
17	Penerimaan pembiyaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan Neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiyaan tahun berkenaan (SILPA)			**xxx**	xxx

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.11

Laporan Realisasi Anggaran Gabungan

4.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Analisis terhadap kinerja anggaran bisa dilakukan dalam empat bagian, yaitu :

1. Analisis kinerja pendapatan daerah
2. Analisis kinerja belanja
3. Analisis kinerja pembiayaan
4. Analisis kinerja APBD secara umum.

1. Analisis kinerja pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum dilihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Hal ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah pelampauan target pendapatan itu disebabkan karena *good planning* dan kerja keras pemerintah daerah ataukh hanya semata-mata *good luck* saja.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BEKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1 3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**32,930,762,000,00**	**68,810,882634,00**	**35,879,120,634,00**	**208,95**
1 3 1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0
1 3 3	Pendapatan Lainnya	32,931,762,000,00	68,810,882,634,00	35,879,120,634,00	208,95
	JUMLAH	**7,091,000,804,180**	**7,787,181,567,577,00**	**696,180,763,397,00**	**109,82**

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.12

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, secara umum kinerja pendapatan daerah dapat dinyatakan baik, yaitu ditunjukan dengan terlampauinya target anggaran sebesar 109,82%. Penerimaan PAD, Pendapatan Transfer, Transfer Pusat- Lainnya, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mencapai target anggaran, hanya saja memang terdapat komponen PAD yang tidak melampaui target, yaitu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 99,88% (kurang Rp 207.791.570,00).

Sebenarnya secara umum, pencapaian penerimaan PAD tidak sangat besar atau dalam batas kewajaran, yaitu hanya sebesar 108,26% saja, dan Pendapatan

Transfer sebesar 112,20%, sementara Lain-lain pendapatan yang Sah capaianya sebesar 208, 95% (sangat baik Rp 35.879.120.634,00). Hal ini berarti Lain-lain pendapatan yang sah tersebut menjadi faktor penentu utama kinerja anggaran pendapatan daerah.

2. Analisis kinerja Belanja Daerah

Analisis kinerja belanja derah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu mengesankan adanya efisiensi anggaran. Namun juga perlu diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja lebih rendah dari anggaran tersebut karena adanya efisiensi ataukah hanya karena ada beberapa program dan kegiatan yang yang tidak dijalankan yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran.

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BEKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2 2	**Belanja Modal**	**106,311,992,617,25**	**726,481,161,889,00**	**(336,830,830,728,25)**	**68,32**
2 2 1	Belanja Tanah	377,268,884,000,00	133,947,722,358,00	(243,321,161,642,00)	35,5
2 2 2	Belanja Peralatan Mesin	182,564,687,920,00	149,686,871,287,00	(32,877,816,633,00)	81,99
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	95,091,601,866,00	80,430,068,184,00	(14,661,533,682,00)	84,58
2 2 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	404,054,613,331,00	358,706,312,855,00	(45,384,300,476,25)	88,78
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4,332,205,500,00	3,710,187,205,00	(622,018,295,00)	85,64
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.13

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BEKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2 4	**Transfer**	**2,029,916,837,850,00**	**2,075,846,644,957,00**	**(45,929,807,107,00)**	**102,26**
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2,024,755,779,046,00	2,074,387,756,862,00	(49,631,977,816,00)	102,45
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	5,161,058,804,00	1,458,888,095,00	(3,702,170,709,00)	28,27
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	JUMLAH	**9,823,483,503,474,00**	**8,193,613,916,013,00**	**(1,089,869,587,461,00)**	**88.26**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(2,192,482,699,294,00)**	**(406,432,348,436,00)**	**1,786,050,350,858,00**	**18.54**

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.14

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, realisasi belanja sebesar 88,26% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini menunjukan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar ±11%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun modal menunjukan kinerja yang baik, terdapat efisiensi yang memadai. Hanya saja terdapat belanja yang realisasinya jauh dari target yang dianggarkan sehingga justru tidak menunjukan efisiensi, yaitu bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota 28,27% dan belanja tanah 35,50% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini justru mengesankan adanya perencanaan anggaran yang

kurang baik untuk pos tersebut. Oleh karena itu, terhadap pos ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut baik dengan melihat Catatan Atas Laporan Keuangan maupun menanyakan langsung kepada eksekutif pada saat penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Selain itu khusus untuk belanja transfer bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota, realisasinya jauh dari target anggaran (28,27%), padahal dana tersebut sebenarnya merupakan hak Kabupaten/Kota yang sebaiknya dialokasikan mendekati jumlah yang dianggarkan. Untuk itu pos tersebut perlu diteliti lebih lanjut penyebab tidak teralokasinya seluruh dana transfer ke Kabupaten/Kota yang sebenarnya sangat penting untuk pembangunan daerahnya masing-masing.

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk melihat pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO URUT	**URAIAN**	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG	%
1	**2**	3	4	5	6
3 2	**Pengeluaran Daerah**				
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	264,546,160,000,00	230,626,160,000,00	(33,920,000,000,00)	87,18
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	167,907,255,00	78,147,895,00	(89,759,360,00)	46,54
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0

Sumber : Data Diolah, 2011

Gambar 4.15

Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, realisasi pembiayaan secara umum tidak menimbulkan keraguan, namun terdapat pos yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu pos realisasi pembayaran pokok utang sebesar 46,54% dari anggaran.

4. Analisis kinerja APBD secara umum

Dengan memeperhatikan kinerja pendapatan, kinerja belanja, dan pembiayaan maka dapat menilai kinerja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dinilai baik. Hanya saja terdapat beberapa catatan yang perlu diperjelas dan dikonfirmasi lebih lanjut. Secara umum, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun dalam laporan tersebut dalam pos Sisa ebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sebesar Rp

1.820.060.110.218,00 hasil perhitungan tersebut berbeda dengan matematisnya. Secara teoritis berdasarkan persamaan matematis, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran nilainya adalah sebesar defisit/surplus ditambah dengan pembiyaan neto. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran tersebut, secara teoritis jumlah SiLPA akhir Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 2.632.924.807.090 (Rp 2.226.492.458.654 + Rp 406.432.348.436). Sementara itu, pada laporan realisasi anggaran tersebut dilaporkan SiLPA sebesar Rp 1.820.060.110.218. Dengan demikian terdapat selisih antara laporan dengan hasil perhitungan matematis sebesar Rp 812.864.796.872. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai SiLPA akhir tahun yang benar perlu dilakukan perhitungan kembali karena nilai tersebut akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Setelah melakukan analisis tersebut maka dapat dinilai bahwa kinerja keungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan kebijakan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Akuntansi Pemerintahan yang hasilnya dapat melakukan efektifitas pendapatan dan efisiensi belanja yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pembahasan kesimpulan diatas disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan aturan PSAK No 2 Tentang Standar Laporan Keuangan, laporan realisasi anggaran

memuat elemen (pos) yang terdiri dari pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan, dan SiLPA (SiKPA).

Hal ini sudah sesuai dengan teori Mahmudi (2010:73) yang menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran terdiri atas enam elemen (pos) utama, yaitu : Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan,dan SiLPA (SiKPA). Namun dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat pos pendapatan (Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 99,88%) yang kurang memberikan kontribusi yang optimal terhadap realisasinya yang dapat dilihat dari presentase laporan realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%, karena dalam pos pendapatan apabila realisasi mencapai 100% dikatakan baik/optimal.

4.2.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Secara umum analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai baik karena dapat mengoptimalkan pendapatan, melakukan efisiensi terhadap belanja, dan menyusun pembiayaan dengan baik. Sehingga menunjukan rencana yang dibuat telah tercapai.

Hal ini telah menjawab teori Hayadi dan Kristiani (2007:103) yang menyebutkan bahwa :

> **“Kinerja merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi”.**

Dan menurut Darma bahwa faktor yang menentukan kinerja diantaranya melakukan efisiensi dan efektifitas biaya, tetapi efisiensi biaya perlu dikaji apakah hal tersebut menunjukan efisiensi atau tidak berjalannya program yang direncanakan.